

ANALISIS PENGELOLAAN PIUTANG PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR OTORITAS

PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

Diajukan Oleh

INCHA APRIELLA

4517012077



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Nama Mahasiswa : Incha Apriella


Stambuk/NIM : 4517012077

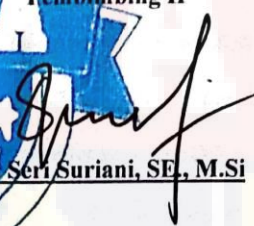
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Muh. Idris, SE., M.Si


Dr. Seri Suriani, SE., M.Si

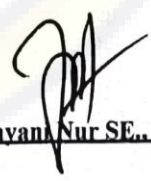
Mengetahui Dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Manajemen**


Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH.,MH


Indrayani Nur, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Incha Apriella

NIM : 4517012077

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali

Makassar, 21 Maret 2021


METERAI
TEMPEL
9110AA IX397671107
Incha Apriella

**ANALISIS PENGELOLAAN PIUTANG PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR OTORITAS
PELABUHAN UTAMA MAKASSAR**

Oleh :

INCHA APRIELLA

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

Incha Apriella. 2021. Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, (dibimbing oleh **H. Muh. Idris, SE.,M.Si dan Dr. Seri Suriani, SE., M.Si**) Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Jenis metode analisis dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Untuk menganalisis pengelolaan piutang maka digunakan ketentuan seperti standar kredit, syarat kredit, kebijakan pengumpulan piutang, dan rasio-rasio yang berhubungan dengan piutang seperti rasio perputaran piutang (*receivable turn over*), rata-rata waktu penagihan piutang (*Average Collection Period*), rasio tunggakan dan rasio penagihan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kantor otoritas pelabuhan utama Makassar telah efektif dan efisien dalam optimalisasi pengelolaan piutang PNBP. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang baik, dengan adanya pengelolaan piutang PNBP mampu meningkatkan penerimaan negara bukan pajak.

Saran diharapkan kantor otoritas pelabuhan utama Makassar tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan efisien dan efektif pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kata Kunci : Piutang, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

**ANALYSIS OF MANAGEMENT OF NON-TAX STATE REVENUE
RECEIVABLES (PNBP) AT THE MAKASSAR MAIN
PORT AUTHORITY OFFICE**

By :

INCHA APRIELLA

Prodi Management Faculty Of Economics And Business

Bosowa University

ABSTRAK

Incha Apriella. 2021. Analysis of Management of Non-Tax State Revenue Receivables (PNBP) at the Makassar Main Port Authority Office, (supervised by H. Muh. Idris, SE., M.Si and Dr. Seri Suriani, SE., M.Si) Management Study Program , Faculty of Economics and Business, University of Bosowa.

This study aims to determine the efficiency and effectiveness of the management of non-tax state receivables (PNBP) at the Makassar Main Port Authority Office. The type of analysis method in this research is descriptive quantitative with data collection techniques, namely through observation, interviews, documentation and literature study. To analyze the management of accounts receivable, provisions such as credit standards, credit terms, accounts receivable collection policies, and ratios related to accounts receivable, such as receivable turnover, average collection period, and arrears ratio are used. and billing ratio.

Based on the research results, it can be concluded that the Makassar main port authority office has been effective and efficient in optimizing the management of PNBP receivables. This can be avoided from the results of a good analysis, with the management of PNBP receivables being able to increase non-tax state revenues.

Suggestions are that the Makassar main port authority office will maintain or even improve the efficient and effective management of non-tax state revenue receivables (PNBP).

Keywords : Receivable, Non-Tax State Revenue (PNBP).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. atas segala kasih dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar” sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Bosowa Makassar.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak, sehingga melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat selama proses penulisan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, papa **Petrus Palebangan** dan mama **Reni Bati**, yang telah melahirkan, membesarkan, memberikan dukungan moril serta memberikan doa secara tulus dan penuh kesabaran kepada penulis, serta menyekolahkan dan membiayai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Bosowa Makassar.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng** selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak **Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
3. Ibu **Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE., MM** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.

4. Ibu **Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si** selaku Ketua Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Bapak **H. Muh. Idris, SE., M.Si** dan Ibu **Dr. Seri Suriani, SE., M.Si** sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi masukan dan motivasi, serta berdiskusi dengan penulis untuk kelancaran penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah, beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa yang telah membantu penulis terkait pengurusan administrasi.
7. Bapak **Rijuddin Rijang S.T**, Selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar beserta seluruh staff pada kantor otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
8. Kedua adik **Ariel anggota** dan **Dhela Gloria Inri** yang selalu menyemangati serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan dengan tulus.
9. Seluruh teman seperjuangan dan teman mahasiswa Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, yang telah mendukung penulis dari awal berkuliah hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh personil Santuy kimmak (**Firda, Nurul, Ega, Windess, Nanas, Mirna, Feby, Abang, Arga, Fauzi, Ai, Fajrin, Ibe, Ance**) plus **Lisdha** yang dari awal kuliah sudah seperti saudara walaupun tak sedara telah mendukung,

11. menemani, membantu, menolong, yang selalu ada disaat suka maupun duka di rantau orang semoga tetap sehat bahagia selalu ya guys.

12. Teman dari zaman dahulu kala **Elisa, Risto, Helion, desri, risan** dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu trimakasih masih jadi teman yang baik semoga tetap begitu seterusnya.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Besar harapan semoga Tuhan mencurahkan berkat, dan kasih karunia-Nya kepada kita semua sehingga apa yang telah dipaparkan penulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 21 Maret 2021

Penulis

\DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINAL	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kerangka Teori.....	6
2.1.1 Manajemen Keuangan.....	6
2.1.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan.....	6
2.1.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan.....	10
2.1.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan	11
2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	13
2.1.2.1 Pengertian PNBP.....	13

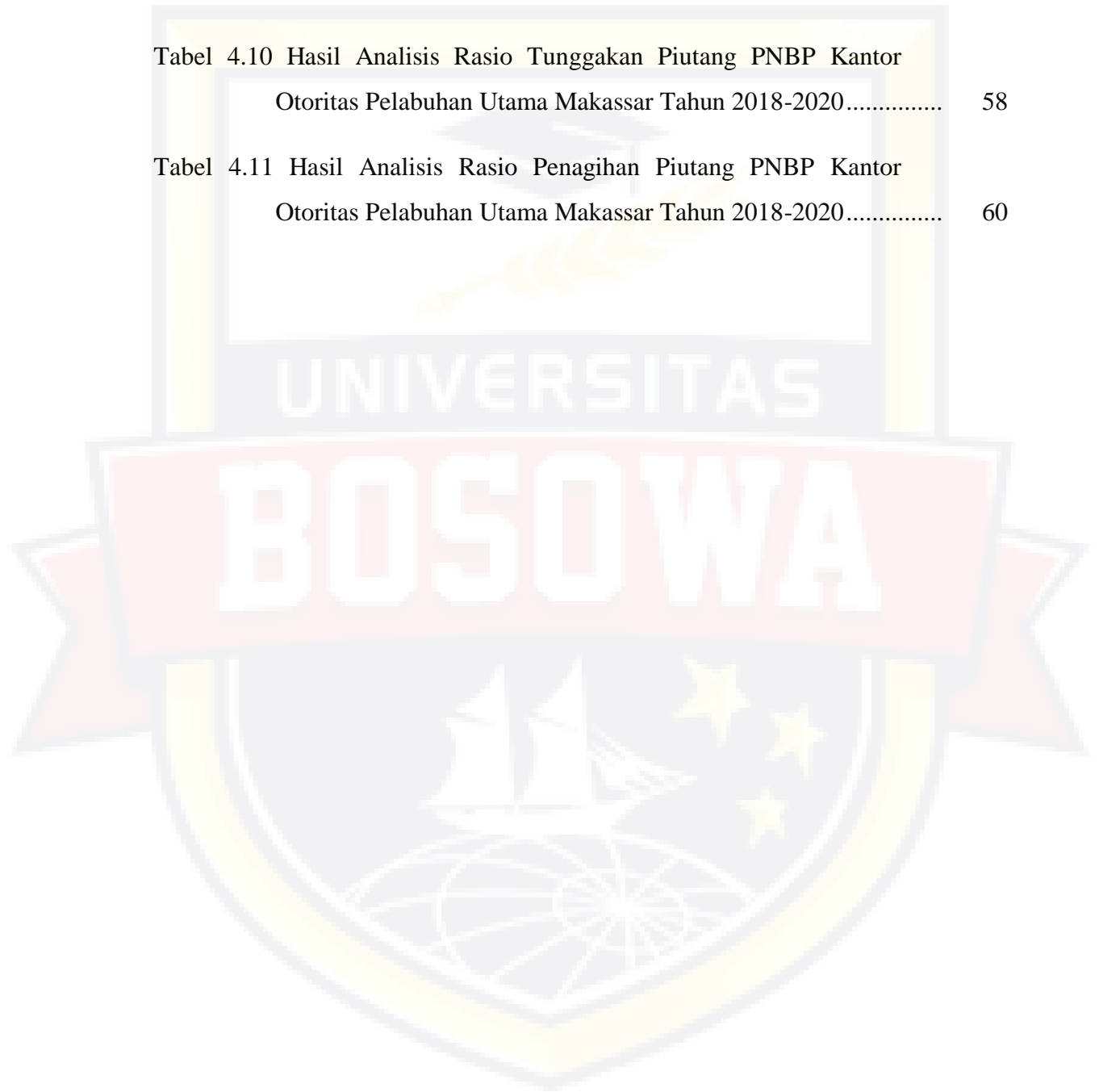
2.1.2.2 Jenis-jenis PNBP	13
2.1.2.3 Fungsi PNBP	14
2.1.3 Piutang.....	15
2.1.3.1 Pengertian Piutang	15
2.1.3.2 Klasifikasi Piutang	16
2.1.3.3 Pengelolaan Piutang.....	17
2.1.3.4 Resiko Kerugian Piutang.....	19
2.1.4 Analisis Rasio Keuangan	21
2.1.4.1 Rasio Aktivitas	22
2.2 Kerangka Pikir.....	25
2.3 Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Daerah Penelitian	28
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.2.1 Penelitian Langsung (<i>Field Research</i>).....	28
3.2.2 Studi Pustaka (<i>Library Research</i>).....	29
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.3.1 Jenis Data	29
3.3.2 Sumber Data.....	31
3.4 Metode Analisis	32
3.5 Defenisi Operasional.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	37
4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	37
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.....	37
4.1.3 Tugas dan Fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.	39
4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	39
4.1.5 Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bagian	41
4.2 Deskripsi Data	45
4.3 Analisis Data	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Piutang PNBK Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2018-2020	3
Tabel 4.1 Rekapitulasi Penerimaan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bulan Desember 2018 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.....	46
Tabel 4.2 Rekapitulasi Penerimaan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bulan Desember 2019 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.....	47
Tabel 4.3 Rekapitulasi Penerimaan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bulan Desember 2020 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.....	48
Tabel 4.4 Rekapitulasi Piutang Dan Penyetoran PNBK Bulan Bulan Desember 2018 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	49
Tabel 4.5 Rekapitulasi Piutang Dan Penyetoran PNBK Bulan Bulan Desember 2019 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	50
Tabel 4.6 Rekapitulasi Piutang Dan Penyetoran PNBK Bulan Bulan Desember 2020 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	51
Tabel 4.7 Hasil Analisis Penerimaan Dan Piutang PNBK Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2018-2020.....	54
Tabel 4.8 Hasil Analisis Rasio Perputaran Piutang PNBK Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2018-2020.....	56

Tabel 4.9 Hasil Analisis Rasio Rata-Rata Waktu Penagihan Piutang PNBP Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2018-2020.....	57
Tabel 4.10 Hasil Analisis Rasio Tunggakan Piutang PNBP Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2018-2020.....	58
Tabel 4.11 Hasil Analisis Rasio Penagihan Piutang PNBP Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2018-2020.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	26
Gambar 4.1 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	37
Gambar 4.2 Stuktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam mencapai target yang telah direncanakan seperti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional, pemerintah tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana ini tentu saja didapatkan dari pendapatan atau penerimaan yang diterima oleh negara, dimana penerimaan ini ditopang oleh dua komponen utama yaitu Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta didukung oleh penerimaan Hibah. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan salah satu penerimaan negara yang tidak berasal dari pajak, penerimaan ini diperoleh berdasarkan pungutan berbentuk iuran, retribusi, sumbangan dan pungutan yang dikenakan atas pelayanan/jasa yang sudah diberikan oleh satuan kerja.

Sebagai satuan kerja yang berada dilingkungan kementerian perhubungan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang di usahakan secara komersial. Menjadi satuan kerja pemerintahan yang bergerak dibidang kepelabuhanan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar juga menjalankan dan menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam mengelola keuangannya seperti menerima, menyetor, membukukan, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan penerima negara bukan pajak (PNBP) yang dikelolannya.

Pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan tanggungjawab setiap kementerian negara/lembaga yang berkewajiban melaksanakan pengelolaan dan pengoptimalisasian piutang penerima negara bukan pajak (PNBP). Hal ini dikarenakan agar piutang penerima negara bukan pajak (PNBP) dapat disajikan dalam laporan keuangan dengan andal dan tepat waktu. Penting bagi perusahaan maupun instansi untuk tetap kompetitif dan perlu menjaga setiap fungsional keuangannya dengan baik agar berjalan efektif dan efisien. Untuk melakukan itu, manajemen keuangan perlu melibatkan pemahaman dan pengendalian dalam mengalokasikan seluruh aset, kewajiban perusahaan, dan memantau pembiayaan terutama didalam penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual.

Sejak diterapkannya pengelolaan keuangan berbasis akrual, pendapatan akan diakui pada saat timbulnya hak pendapatan tersebut. Apabila terdapat tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih pada laporan keuangan, harus di catat sebagai penambahan aset berupa piutang. Oleh karena itu, agar pendapatan negara mampu mencapai hasil yang maksimal satuan kerja kementerian negara/lembaga yang mengelolah penerima negara bukan pajak (PNBP) sangat memiliki peran penting dalam mewujudkan efektif dan efesiensi pengelolaan Piutang penerima negara bukan pajak (PNBP).

Piutang penerima negara bukan pajak (PNBP) biasanya timbul akibat penjualan kredit atau belum terbayarkannya PNBP terutang oleh pihak wajib bayar. Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar piutang PNBP timbul

akibat pelayanan jasa digunakan oleh pihak wajib bayar PNBPN yang belum dibayarkan dan dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah yang belum dilunasi. Apabila telah diketahui adanya piutang PNBPN, maka pengelola keuangan PNBPN akan melakukan penagihan kepada wajib bayar. Penagihan dilakukan secara tertulis dengan membuat surat penagihan (SPn) kepada wajib bayar yang terutang PNBPN. Untuk mengetahui sejauh mana Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar melakukan pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maka pihak pengelolah wajib membuat rekapitulasi piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Tabel berikut ini adalah data rekapitulasi piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

**TABEL 1.1 REKAPITULASI PIUTANG PNBPN
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
TAHUN 2018-2020**

NO	Tahun	Piutang	Perubahan (%)
1	2018	Rp 5.288.232.361	-
2	2019	Rp 3.835.239.615	-27,47%
3	2020	Rp 5.978.571.681	55,88%

Sumber : Laporan keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (diolah)

Sebagai salah satu aset lancar perusahaan piutang merupakan unsur yang sangat penting dan memerlukan kebijakan yang baik dari manajemen dalam pengelolaannya agar tidak hanya dapat meningkatkan volume penjualan/pendapatan namun piutang juga mengandung suatu resiko bagi perusahaan. Untuk meminimalisir resiko atau kerugian akibat piutang dan

terwujudnya pengelolaan piutang yang efektif dan efisien maka perusahaan atau pihak pengelola piutang dapat meningkatkan penagihan piutang pada setiap pelanggan atau pihak wajib bayar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Apakah pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah efektif dan efisien ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi :

1. Instansi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau bahan masukan untuk mengoptimalisasikan efektivitas pengelolaan

piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

2. Institusi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan ilmu tambahan dalam mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pemenuhan syarat untuk menyelesaikan studi pada fakultas ekonomi dan bisnis universitas bosowa
4. Pihak yang berkepentingan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, pembanding, serta bahan pustaka.

BOSOWA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Manajemen Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Anwar (2019:5) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.

Wijaya (2017:2) menyatakan bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, serta usaha memperoleh dana.

Adapun Manahan dalam Kariyoto (2018:3-4) berpendapat bahwa manajemen keuangan merupakan integrasi dari *science* dan *art* yang mencermati dan menganalisa upaya manajer *financial* dengan menggunakan seluruh SDM perusahaan untuk mencari *funding*, dan membagi *funding* dengan *goal* mampu memberikan laba atau *welfare* bagi para pemilik saham dan keberlanjutan (*sustainability*) bagi entitas ekonomi.

Menurut Handini (2020:3) manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelolah aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Menurut *Tulsian* (2020:4) bahwa :

“Financial Management is basically the application of general management principles to the areas of financial decision-making (such as Investment, Financing, Dividend & Working Capital) with a view to maximize the wealth of the company is the shareholders”. Artinya yaitu manajemen keuangan pada dasarnya adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen pada bidang pengambilan keputusan keuangan (seperti investasi, pembiayaan, dividen & modal kerja) dengan maksud untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan yaitu para pemegang saham.

Sugeng (2017:2) menjelaskan bahwa manajemen keuangan umumnya didefinisikan sebagai berikut:

Upaya perusahaan memperoleh dana yang dibutuhkan, memanfaatkan atau mengalokasikan dana yang diperoleh, dan mendistribusikan hasil dari pemanfaatan dana kepada pemilik perusahaan dengan cara-cara yang rasional dengan tujuan untuk menciptakan atau meningkatkan nilai perusahaan.

Jatmiko (2017:1-2) menerangkan bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen keuangan diatas dapat memberikan pemahaman bahwa manajemen keuangan adalah salah satu fungsi dari manajemen berupa aktivitas didalam perusahaan yang berhubungan dengan semua kegiatan Pengelolaan keuangan baik itu perencanaan, penganggaran, pencarian, pembagian dana yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan dan pemilik saham.

2.1.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan

Menurut Irfani (2020:15-19) terdapat tiga fungsi utama manajemen keuangan, yaitu fungsi pendanaan, fungsi operasional, dan fungsi investasi. Ketiga fungsi utama tersebut terefleksi pada pengategorian arus kas perusahaan yang meliputi arus kas pendanaan, arus kas operasional, dan fungsi investasi. Keberhasilan dalam mengelolah ketiga fungsi utama tersebut juga didukung oleh fungsi-fungsi penunjang, seperti fungsi *forecasting* (prakiraan) dan perencanaan jangka waktu keuangan, fungsi pengendalian keuangan, fungsi pembagian dividen, dan sebagainya.

Manajemen keuangan, menurut Musthafa (2017:7-8), memiliki beberapa fungsi diantaranya:

1. Fungsi pengendalian likuiditas
 - a. Perencanaan aliran kas, agar uang tunai atau kas selalu tersedia saat diperlukan.
 - b. Pencarian dana, agar dana selalu tersedia saat diperlukan dan dana yang diperoleh memiliki biaya yang murah.
 - c. Menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan dana saat diperlukan.
2. Fungsi pengendalian laba
 - a. Pengendalian biaya untuk menghindari biaya yang tidak diperlukan.
 - b. Penentuan harga agar tidak terlalu mahal dibandingkan harga dari pesaing.
 - c. Perencanaan laba agar dapat memprediksi keuntungan yang akan didapatkan pada suatu periode sehingga dapat merencanakan kegiatan usaha dengan baik.
 - d. Pengukuran biaya kapital agar dapat digunakan di kegiatan lain yang juga dapat menghasilkan keuntungan.
3. Fungsi manajemen
 - a. Manajer keuangan harus mengambil keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan dalam usaha pengendalian laba.
 - b. Manajer keuangan harus menerapkan fungsi manajemen, terutama fungsi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian dalam pengelolaan aktiva dan dana.

Sedangkan Handini (2020:3) Menjelaskan fungsi utama Manajemen

Keuangan :

1. *Investment decision*: keputusan terhadap aktiva yang akan dikelola perusahaan.
2. *Financing decision*: keputusan berkaitan dengan penetapan sumber dana yang diperlukan dan penetapan perimbangan perbelanjaan yang terbaik (stuktur modal yang optimal).
3. *Assets management decision*: keputusan berkaitan penggunaan dan pengelolaan aktiva (kata bijak: lebih mudah membangun daripada mengelola).

Berdasarkan uraian para ahli diatas maka dapat disimpulkan fungsi manajemen keuangan mengatur, mengarahkan, mengendalikan, dan pengambilan keputusan terkait dengan pendanaan (cara memperoleh dan menggunakan) yang dilakukan oleh pengelola keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.1.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan

Menurut Jatmiko (2017:32) bahwa tujuan manajemen keuangan yaitu memaksimalkan keuntungan dan memaksimalkan kekayaan.

Anwar (2019:5) menjelaskan tujuan manajemen keuangan adalah agar perusahaan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki terutama dari aspek keuangan sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal dan pada akhirnya dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Aisyah dkk (2020:16) menyebutkan tujuan manajemen keuangan secara umum adalah :

1. Membuat keputusan yang tepat dalam rangka memaksimalkan laba.
2. Menstabilkan arus kas agar kewajiban dan beban perusahaan dapat terpenuhi dengan baik.
3. Menjamin struktur modal yang bersumber dari internal dan eksternal.
4. Memanfaatkan dana secara tepat dan optimal untuk menjaga efisiensi.

5. Memaksimalkan kekayaan perusahaan agar optimalisasi pembagian dividen pada para pemegang saham dan laba ditahan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
6. Menjaga tingkat efisiensi supaya alokasi keuangan tepat dalam semua aspek di dalam perusahaan.

Menurut Nurhayati (2017:94) tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan (memaksimalkan kemakmuran pemegang saham) yang diukur dari harga saham perusahaan. harga saham merupakan refleksi dari keputusan-keputusan investasi, pendanaan (termasuk kebijakan dividen) dan pengelolaan aset.

Herison (2018:17) menjelaskan bahwa ... tujuan normatif manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan kemakmuran para pemegang saham. Tujuan manajemen keuangan dapat juga diarahkan untuk mengupayakan dari setiap unit kegiatan usaha perusahaan dapat menghasilkan keuntungan / profit secara maksimal dan menghindari pemborosan keuangan, serta menjaga keseimbangan dari sumber modal yang tersedia dengan penggunaan modal dalam kegiatan perusahaan.

Dari pemaparan para ahli diatas dapat menjelaskan bahwa tujuan dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan yaitu memaksimalkan laba, keuntungan maupun kekayaan dengan mengelolah aktiva yang dimiliki sebaik mungkin. Selain itu, membuat keputusan yang tepat dan menjaga efisiensi pengelolaan keuangan juga menjadi tujuan dalam manajemen keuangan.

2.1.2 PNBP

2.1.2.1 Pengertian PNBP

Peraturan Menteri No 77 tahun 2016 menyebutkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dari beberapa pengertian PNBP diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah penerimaan negara diluar pajak dan hibah yang bersumber dari pungutan atas manfaat layanan jasa atau pemanfaatan sumber daya.

2.1.2.2 Jenis-jenis PNBP

Jenis-jenis PNBP berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 2018, yaitu:

- a. Pemanfaatan sumber daya alam;
- b. Pelayanan;

- c. Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan;
- d. Pengelolaan barang milik negara;
- e. Pengelolaan dana; dan;
- f. Hak negara lainnya.

Adapun jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016) terdiri atas :

- a. Jasa Kepelabuhanan
- b. Jasa penerbitan surat izin kepelabuhanan
- c. jasa kenavigasian
- d. Penerimaan uang perkapalan dan kelautan
- e. Jasa angkutan laut

2.1.2.3 Fungsi PNBP

Halim (2014:56) Menyebutkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

memiliki beberapa fungsi antara lain :

- a. Fungsi *budgeter*, yaitu PNBP berfungsi sebagai penerimaan negara yang diperoleh setelah memberikan pelayanan jasa atau menjual barang milik negara oleh kementerian/lembaga negara kepada masyarakat. Penerimaan ini dapat pula berasal dari pungutan dalam bentuk iuran, retribusi, sumbangan atau pungutan.
- b. Fungsi *regulasi*, yaitu PNBP dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda pembangunan.

Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 PNBP menjelaskan bahwa pada prinsipnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penganggaran (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*). Selaku fungsi penganggaran (*budgetary*), PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang anggaran pendapatan dan belanja negara melalui optimalisasi penerimaan negara. Sedangkan selaku fungsi pengaturan (*regulatory*), PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam.

Berdasarkan uraian tentang fungsi dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diatas penulis menyimpulkan bahwa fungsi dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah sebagai penganggaran (*budgetary*) yang berfungsi sebagai penerimaan negara untuk menunjang RAPBN dan sebagai pengaturan (*regulatory*) yang berfungsi mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek demi menggerakkan roda pembangunan, serta kegiatan ekonomi dan social.

2.1.3 Piutang

2.1.3.1 Pengertian Piutang

Definisi piutang menurut Rudianto (2018:98) pengertian piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, dan jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu.

Sumiyati dan Yatimatun (2021:30) menjelaskan Piutang merupakan hak atau klaim yang dimiliki perusahaan kepada pihak, dapat berupa entitas/perusahaan organisasi, instansi perusahaan, swasta, bahkan individu sekalipun.

Irham Fahmi dalam Methasari (2019:16) Piutang merupakan bentuk penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dimana penerimaan pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, namun bersifat bertahap.

Menurut Anwar (2019:70) piutang adalah tagihan perusahaan akibat transaksi penjualan secara kredit. Piutang merupakan salah satu aktiva lancar perusahaan yang juga merupakan bagian dari modal kerja perusahaan.

Piutang menurut Irfani (2020:302) adalah hasil atau pembayaran yang akan diterima oleh perusahaan dari pelanggannya atas penjualan barang/jasa

secara kredit. Periode kredit dagang pada umumnya berjangka waktu pendek dari beberapa hari hingga satu bulan.

Kariyoto (2018:67) menjelaskan *account receivable* timbul ketika penjualan kredit terjadi, karena perusahaan belum mendapatkan kas. Dengan demikian pemanfaatan piutang diharapkan bisa meningkatkan sales dan profit.

Dari uraian diatas maka penulis mengartikan piutang adalah aset keuangan perusahaan, berupa klaim atau tagihan yang telah jatuh tempo atas transaksi penjualan/pendapatan dari uang, barang, dan jasa milik perusahaan yang telah digunakan oleh pelanggan.

2.1.3.2 Klasifikasi Piutang

Didalam pengelolaannya piutang diklasifikasikan kedalam beberapa jenis piutang. Menurut Hery dalam Lahengking dkk (2017:359) pada umumnya piutang di klasifikasikan menjadi :

- a. Piutang Usaha (*account receivable*)
Jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha memiliki saldo normal untuk aset. Piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu yang relative pendek, biasanya 30 hingga 60 hari. Setelah ditagih, secara pembukuan, piutang usaha akan berkurang disebelah kredit. Piutang usaha diklasifikasikan dalam neraca sebagai assert lancer (*current asset*).
- b. Piutang Wesel (*notes receivable*)
- c. Piutang lainnya.

Adapun klasifikasi piutang Menurut Sumiyati dan Yatimatun (2020: 31-32) ialah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jangka waktu:
 - a. Piutang lancer atau piutang jangka pendek (*current receivables*)
 - b. Piutang jangka panjang (*noncurrent receivables*).

2. Berdasarkan penyebab transaksi terjadinya:

- a. Piutang nondagang atau piutang diluar usaha.
- b. Piutang dagang atau piutang usaha.

3. Berdasarkan ada tidaknya dokumen-dokumen tertulis yang mendukung tagihan tersebut:

- a. Piutang wesel atau wesel tagih (*notes receivable*).
- b. Piutang nonwesel.

Klasifikasi piutang menurut IAI PSAK No. 09 paragraf 07e dalam Pertiwi dkk (2020:69) adalah piutang dagang , piutang wesel, dan piutang lain-lain.

Menurut Hery dalam Demak dkk (2018:348) piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Piutang usaha (*accounts receivable*)
2. Piutang wesel (*notes receivable*)
3. Piutang lain-lain (*other receivable*)

Sedangkan Menurut Kieso dkk dalam Demak dkk (2018:348) piutang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebaga berikut:

1. piutang lancar
Piutang lancar merupakan piutang yang akan ditagih dalam masa satu tahun atau selama satu siklus operasi berjalan, mana yang lebih panjang.
2. piutang tidak lancar
Piutang tidak lancar merupakan piutang yang akan tertagih lebih dari satu tahun.

Berdasarkan uraian maka penulis menyimpulkan untuk dapat mengelolah piutang sesuai dengan jenisnya maka piutang diklasifikasikan menjadi piutang usaha/piutang dagang, piutang wesel dan piutang lain-lain setiap piutang memiliki perbedaan baik dari jangka waktunya maupun dari sebab transaksinya untuk itu dalam pengelolaannya juga tentu berbeda.

2.1.3.3 Pengelolaan Piutang

Didalam setiap perusahaan tentu dibutuhkan manajemen yang mengelolah piutang secara efektif dan efisien. Hal ini diperlukan menimbang piutang

merupakan salah satu aset yang material, dengan adanya manajemen pengelolaan piutang yang baik diharapkan perusahaan mampu menyeimbangkan antara jumlah dana yang diinvestasikan dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan sehingga tidak mengganggu aliran kas yang dimiliki.

Pengelolaan piutang menurut Ardipawiro dalam Widayanti (2019:6-7) meliputi :

- a. Standar kredit, untuk mengetahui kemauan dan kemampuan pelanggan dalam membayar kewajibannya dan untuk mengurangi dan menghindari resiko piutang tak tertagih.
- b. Persyaratan kredit, untuk meningkatkan volume penjualan kredit dan dapat mempengaruhi pelanggan untuk segera membayarkan tagihannya.
- c. Kebijakan pengumpulan piutang
Teknik-teknik dalam pengumpulan piutang dapat melalui :
 - 1) Teguran (melalui surat ataupun telepon), yang bersifat mengingatkan sebelum jatuh tempo.
 - 2) Kunjungan kerumah pelanggan (*door to door*).
 - 3) Menggunakan agen/pihak ketiga.
 - 4) Tindakan secara hukum atau tuntutan secara perdata.

Anwar (2019:71) menyebutkan bahwa dalam manajemen piutang, terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan yaitu :

1. *Credit selection and standards* (standar pengkreditan dan seleksi kredit).
2. *Credit terms* (syarat-syarat kredit)
3. *Credit Monitoring* (pengawasan kredit)

Manurung dan Nugraha dalam Mulyaningtyas (2017:64-65) Pengelolaan piutang usaha yang baik sebagai upaya untuk lebih meningkatkan performansi/kinerja keuangan sehingga dapat menekan biaya-biaya terutama yang berkaitan langsung dengan pengelolaan piutang usaha seperti penyisihan piutang, penagihan piutang (yang bermasalah), dan penghapusan piutang usaha.

Mulyaningtyas (2017:64) menjelaskan bahwa Pengelolaan piutang yang baik akan membantu organisasi dalam mengurangi resiko kerugian piutang organisasi. Pengelolaan dan pengawasan terhadap kredit dan pembayaran yang diberikan kepada pelanggan adalah salah satu cara yang efektif bagi organisasi untuk menekan kerugian yang ditimbulkan oleh piutang yang tidak tertagih.

Menurut Sundjaja dalam Nugraha dkk (2020:3) manajer keuangan langsung mengawasi piutang dagang melalui keterlibatan dalam pengelolaan:

1. Kebijakan kredit, suatu penentu dalam penyeksian pemberian kredit, standar kredit, dan syarat kredit.
2. Kebijakan penagihan, pendekatan perusahaan untuk mengelolah setiap aspek piutang dagang sangat dipengaruhi oleh kondisi persaingan.

Handayani (2020:6-9) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan piutang, perlu adanya suatu kebijakan pengelolaan piutang yang meliputi pengambilan keputusan-keputusan sebagai berikut :

- a) Standar kredit
- b) Persyaratan kredit
- c) Kebijakan pengumpulan piutang
- d) Rasio yang berhubungan dengan piutang

Berdasarkan penjelasan mengenai pengelolaan piutang diatas maka penulis menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang pada suatu perusahaan dapat dilakukan dengan langkah-langkah yaitu menentukan syarat kredit, standar kredit, kebijakan dan rasio yang berhubungan dengan pengelolaan piutang.

2.1.4.4 Resiko Kerugian Piutang

Pratiwi (2019:17-18) menjelaskan bahwa resiko kerugian piutang merupakan resiko yang timbul akibat adanya transaksi penjualan secara kredit.

Semakin besar *day's receivable* suatu perusahaan semakin besar pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Apabila perusahaan tidak membuat cadangan terhadap kemungkinan kerugian yang timbul karena tidak tertagihnya piutang berarti perusahaan telah memperhitungkan besarnya laba. Resiko kerugian piutang terdiri dari beberapa macam, yaitu :

- a. Resiko tidak dibayarnya seluruh piutang
Hal ini dapat terjadi karena beberapa factor, missal kurang baiknya penyelesaian pelanggan, adanya stabilitas ekonomi dan kondisi negara yang tidak menentu sehingga piutang tidak dapat dikembalikan.
- b. Resiko tidak dibayarnya sebagian piutang
Hal tersebut akan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan dapat menimbulkan kerugian (apabila jumlah piutang yang dikembalikan kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit).
- c. Resiko keterlambatan pelunasan piutang
- d. Resiko tidak tertanamnya modal dalam piutang
Hal ini dapat terjadi karena adanya tingkat perputaran piutang yang rendah mengakibatkan jumlah modal kerja yang tertanam pada piutang semakin besar dan mengakibatkan terjadinya modal kerja yang tidak produktif.

Banyaknya resiko akibat yang timbul akibat pemberian piutang bahkan dapat membuat suatu perusahaan mengalami kegagalan. Menurut Nitisemito dalam Kridayanti (2015:19) kemungkinan-kemungkinan resiko yang timbul adalah:

- a. Resiko tidak dibayar seluruh piutangnya
- b. Resiko tidak dibayar sebagian piutangnya
- c. Resiko keterlambatan di dalam melunasi piutang-piutangnya
- d. Resiko tertanamnya modal dalam piutang

Tambunan dan Noviana dalam Gista dkk (2017:2-3) menjelaskan bahwa piutang dapat menjadi potensi bila dikelola dengan baik, tetapi sebaliknya akan menjadi risiko bila tidak dikelola dengan baik. Risiko kerugian piutang dapat berupa risiko tidak dibayarnya sebagian atau seluruh piutang, atau keterlambatan

pelunasan piutang. Hal ini berdampak pada pendapatan usaha menjadi berkurang dan menurunnya kinerja perusahaan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka penulis menyimpulkan bahwa resiko kerugian dari piutang dapat berdampak dan memberikan pengaruh yang tidak baik untuk perusahaan, pihak pengelolah keuangan kiranya dapat mewaspadaai resiko-resiko yang kemungkinan akan menggagalkan kemajuan perusahaan. Adapun resiko kerugian piutang yang dapat terjadi adalah tidak dibayar sebagian maupun seluruh piutang, keterlambatan dalam pelunasan dan resiko tertanamnya modal dalam piutang yang dapat membuat menurunnya perputaran piutang serta pendapatan yang menurun tidak sesuai dengan transaksi penjualan.

2.1.4 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan menurut Kasmir (2017:104) merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antarkomponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Drake dalam Karyoto (2017:1) mengungkapkan *financial analisis* sebagai suatu *selection, evaluation, dan interpretation* terhadap *financial data* keuangan, mengkorelasi dengan informasi lain yang dengan tujuan dapat membantu *decision makers invesmet dan financial*.

Warsidi dan Bambang dalam Dewi (2017:3) menyatakan analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan perusahaan.

Sedangkan menurut Munawir dalam Dewi (2017:3) analisis rasio keuangan adalah analisis yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan menggunakan alat analisa berupa rasio yang dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan analisis rasio keuangan merupakan alat untuk menilai kinerja prestasi perusahaan dan mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini dapat digunakan untuk menilai dan mengukur kemampuan kinerja manajemen dalam suatu periode pada suatu perusahaan atau instansi dan kemampuan dalam memberdayakan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien serta juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan kebijakan yang diharapkan dapat mengoptimalisasikan keuangan perusahaan atau instansi terkait.

2.1.4.1 Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)

Menurut Kasmir (2017:114) Rasio Aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (penjualan, sediaan, penagihan piutang, dan lainnya) atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Septiana (2019:93) menerangkan bahwa rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan. *Activity ratio* merupakan alat ukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva.

Menurut Elaga dkk (2018:2) rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya.

Dari pengertian diatas penulis menarik kesimpulan yaitu rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan efektif dan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Didalam rasio aktivitas terdapat beberapa rasio pengelolaan piutang, berikut adalah rasio-rasio piutang dalam rasio aktivitas :

a. Perputaran piutang (*recevable turn over*)

Menurut Kasmir (2017:176) perputaran piutang merupakan rasio yang di gunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik.

Menurut Elaga dkk (2018:5) posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulan piutang dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang tersebut yaitu dengan membagi total penjualan kredit (*neto*) dengan piutang rata-rata.

Septiana (2019:96) menjelaskan bahwa *Receivable turn over* (perputaran piutang) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode/berapa kali dana ditanam dalam piutang ini berputar dalam suatu periode.

$$\text{Perputaran piutang} = \frac{\text{penjualan kredit}}{\text{rata - rata piutang}} \times 1\text{Kali}$$

dimana untuk menghitung rata-rata piutang adalah,

$$\text{Rata - rata piutang} = \frac{\text{saldo Piutang awal} + \text{saldo piutang akhir}}{2}$$

b. Rata-rata waktu penagihan piutang (*average collection period*)

Menurut Sutrisno dalam Darmayasa (2017:88) *Average Collection Periode (ACP)* yaitu perbandingan antara piutang usaha dan rata-rata penjualan per hari. *ACP* mengukur rata-rata waktu penagihan atas penjualan. Semakin pendek *ACP*, semakin baik kinerja perusahaan tersebut karena modal kerja yang tertanam dalam bentuk piutang kecil sekaligus mencerminkan sistem penagihan piutang berjalan dengan baik.

Elaga dkk (2018:5) menjelaskan rasio ini mengukur efisiensi pengelolaan piutang perusahaan, serta menunjukkan berapa lama waktu

yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur piutang dihitung dengan membandingkan jumlah piutang dengan penjualan perhari.

$$\text{Rata - rata waktu penagihan piutang} = \frac{365}{\text{RTO}}$$

c. Rasio tunggakan

Menurut Keown dalam Darmayasa (2017:88) rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa besar jumlah piutang yang telah jatuh tempo dan belum tertagih dari sejumlah penjualan kredit yang dilakukan.

$$\text{Rasio Tunggakan} = \frac{\text{Jumlah Piutang Tertunggak pada Akhir Periode}}{\text{Total Piutang Pada Periode yang Sama}} \times 100\%$$

d. Rasio penagihan

Menurut Keown dalam Darmayasa (2017:88) rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas penagihan yang dilakukan atau berapa besar piutang yang tertagih dari total piutang yang dimiliki perusahaan.

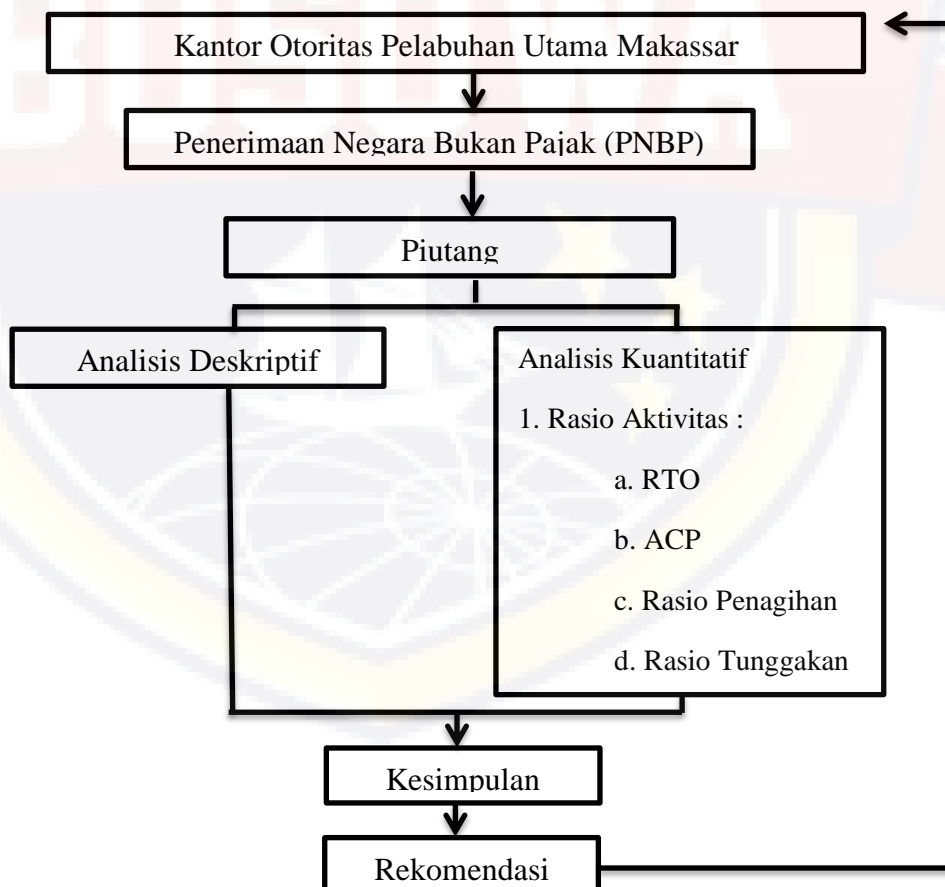
$$\text{Rasio Penagihan} = \frac{\text{Jumlah Piutang Tertagih}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pikir

Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kondisi efisien dan efektif perusahaan dalam hal pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Selain itu, hasil analisis ini dapat menggambarkan

kemampuan perusahaan dalam mengelolah piutang yang dimiliki. Untuk itu pada penelitian ini penulis menggunakan salah satu rasio keungan yaitu rasio aktivitas dimana rasio ini mencakup rasio perputaran piutang (*Receivable Turn Over*), rasio rata-rata penagihan piutang (*Average Collection Periode*), rasio penagihan dan rasio tunggakan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya bagi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dalam mengelolah aktiva salah satunya piutang dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka maka dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Teori (diolah)

2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis menarik suatu hipotesis sebagai berikut :

“Diduga bahwa pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah efisien dan efektif.”



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Dalam upaya untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang berlokasi di jl. Madura no. 1 kota Makassar.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang penulis gunakan untuk memperoleh data-data yang akurat dan relevan terkait dengan penelitian ini. Adapun Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.2.1 Penelitian Langsung (*Field Research*)

Penelitian langsung atau studi lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dilokasi tempat data berada yaitu baik dalam penelitian skala kecil maupun besar (Sugiarti dkk, 2020:39).

Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung dilokasi yaitu dikantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar pada ruangan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian langsung yaitu meliputi :

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti (Mardawani, 2020:51).

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan pengelolaan pada bagian keuangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang terjadi antara pewawancara dan narasumber untuk bertukar informasi dan ide melalui interaksi tanya jawab (Mardawani, 2020:57).

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung terhadap beberapa pegawai/staff yang ada pada bagian keuangan khususnya pada bagian pengelolaan Piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai narasumber yang memberikan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber ... Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Mardawani, 2020:59).

Dalam penelitian ini pengumpulan data dalam bentuk data-data tertulis yang terkait dengan pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa laporan keuangan dan tatacara penatausahaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

3.2.2 Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka, menurut Sugiarti dkk (2020:39) merupakan studi yang dilakukan dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data utamanya, seperti naskah, buku, koran, majalah, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka pustaka tidak hanya mengacuh pada dokumen tulis saja, tetapi juga dokumen digital. Semuanya merujuk pada makna yang sama, yaitu dokumen yang ada didalam internet.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang didapatkan dari membandingkan dan mengkaji beberapa sumber, membaca dan mempelajari buku-buku literatur seperti Analisis Laporan Keuangan, Modul Pemungutan dan Penyetoran PNBP, Modul Sistem Akuntansi Keuangan, modul penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), jurnal-jurnal penelitian, skripsi-skripsi terdahulu, serta referensi lainnya yang terkait dengan pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari internet.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif menurut Salim dan Haidir (2019: 105) adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya data kuantitatif diolah dan dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.

Data kuantitatif dalam penelitian ini di peroleh dari arsip atau berkas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa laporan keuangan seperti rekapitulasi penerimaan dan penyeteroran Penerimaan negara bukan pajak (PNBP), rekapitulasi Piutang, neraca, dan laporan laba-rugi.

b. Data Kualitatif

data kualitatif menurut Salim dan Haidir (2019:104-105) adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).

Adapun data kualitatif dalam penelitian ini ini yaitu berupa gambaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, stuktur organisasi, visi misi dan informasi lain yang penulis perlukan terkait penelitian ini.

3.3.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer (*Primary Data*)

Dijelaskan oleh Salim dan Haidir (2019:103) bahwa data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara,

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala sub bagian keuangan dan pegawai/staff pengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

b. Data Sekunder (*secondary Data*)

Dijelaskan oleh Salim dan Haidir (2019:104) bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti biro pusat statistic (BPS), buku, laporan, jurnal. Dan lain-lain.

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa sejarah berdirinya instansi, stuktur organisasi, kegiatan didalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hasil dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Metode Analisis

Penulis melakukan analisis sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis menjabarkannya dengan menggunakan metode analisis deskriptif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif .

Dalam pelaksanaan pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak pada penelitian ini menggunakan empat ketentuan didalam pengelolaan piutang meliputi:

1. Standar kredit
2. Persyaratan kredit
3. Kebijakan pengumpulan piutang
4. Rasio yang berhubungan dengan piutang

Penjualan secara kredit akan mengakibatkan dan mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perlu menilai sisi piutang dengan menggunakan alat analisis berupa rasio-rasio yang berhubungan dengan piutang. Adapun alat analisis yang penulis gunakan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti yaitu dengan rasio aktivitas. Menurut Dr. kasmir (2017:172) Rasio aktivitas (*activity ratio*) merupakan rasio yang di gunakan untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Kemudian hasil yang akan diperoleh kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan atau dengan hasil pengukuran sebelumnya.

Dalam penelitian ini rasio aktivitas yang penulis gunakan adalah rasio perputaran piutang (*receivable turn over*), rasio Rata-rata waktu penagihan piutang (*average collection period*), rasio tunggakan dan rasio penagihan. Untuk menghitung rasio-rasio ini maka digunakan rumus sebagai berikut :

1. Perputaran Piutang (*Receivable Turn Over*)

$$\text{Receivable Turn Over} = \frac{\text{Nett Credit Sales}}{\text{Average Receivable}} \times 1\text{Time}$$

Atau

$$\text{Perputaran piutang} = \frac{\text{penjualan kredit}}{\text{rata - rata piutang}} \times 1\text{Kali}$$

Sedangkan, untuk menghitung rata-rata piutang maka digunakan alat ukur sebagai berikut :

$$\text{Rata - rata piutang} = \frac{\text{saldo Piutang awal} + \text{saldo piutang akhir}}{2}$$

2. Rata-rata waktu penagihan piutang (*average collection period*)

$$\text{Average Collection Period} = \frac{360}{\text{Receivable Turn Over}}$$

Atau

$$\text{Rata - rata waktu penagihan piutang} = \frac{365}{\text{perputaran piutang}}$$

3. Rasio Tunggakan

$$\text{Rasio Tunggakan} = \frac{\text{Jumlah Piutang Tertunggak pada Akhir Periode}}{\text{Total Piutang Pada Periode yang Sama}} \times 100\%$$

4. Rasio Penagihan

$$\text{Rasio Penagihan} = \frac{\text{Jumlah Piutang Tertagih}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

3.5 Defenisi Operasional

1. penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah penerimaan negara diluar pajak dan hibah yang dikelola Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dimana penerimaan ini bersumber dari pungutan atas manfaat layanan jasa kepelabuhanan atau pemanfaatan sumber daya.
2. piutang adalah aset keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar, berupa klaim atau tagihan yang telah jatuh tempo atas transaksi penjualan/pendapatan dari uang, barang, dan jasa milik Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar yang telah digunakan oleh pihak wajib bayar atau debitur.
3. Analisis rasio keuangan merupakan alat yang digunakan untuk membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.
4. Rasio Aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur dan menunjukkan tingkat efektif Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dalam pemanfaatan dan pengoptimalan aktiva berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dikelola.
5. Perputaran piutang (*receivable turn over*) adalah rasio yang digunakan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar untuk melihat posisi dan pengelolaan piutang dari penerimaan negara bukan pajak yang dikelolanya.

6. Rata-rata waktu penagihan piutang adalah kemampuan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dalam melakukan penagihan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihitung dalam jumlah hari.
7. Rasio tunggakan adalah persentase dari jumlah piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dikelola Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang telah jatuh tempo dan belum tertagih dari sejumlah piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang didapatkan.
8. Rasio penagihan adalah persentase dari jumlah piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tertagih dari total piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dimiliki Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar



Gambar 4.1 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (Dokumentasi)

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah tanggung jawab Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Misi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar adalah mengawasi, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pelabuhan komersial. Sebelum menjadi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, urutan kronologis pembentukan kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar disebut Administrasi Pelabuhan (ADPEL).

Pada tanggal 10 Oktober 2010 usulan pembentukan organisasi badan otoritas pelabuhan (Port Authority) atau OP, sebagai mana di amanatkan undang-undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008, telah di setujui. Pemerintah melalui kementerian perhubungan selaku pengusul akan membentuk empat kantor utama OP dan Syahbandar di pelabuhan utama. Yaitu :

1. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Medan;
2. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta;
3. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Surabaya;
4. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

Kemudian pada tanggal 9 Mei 2011 direktur jenderal perhubungan laut kementerian perhubungan, Sunaryo meresmikan Kantor Otoritas Pelabuhan Wilayah IV Makassar, Sulawesi Selatan yang bertempat di Jln. Madura No. 1, Pelabuhan Makassar.

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Otoritas Pelabuhan

4.1.2.1 Visi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

“Terselenggaranya Pelabuhan yang kondusif, efektif, efisien dan berdaya saing tinggi dalam menunjang perekonomian nasional di Era Globalisasi”

4.1.2.2 Misi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

1. Menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus barang serta kelestarian lingkungan pelabuhan;
2. Mewujudkan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan sesuai dengan kondisi fasilitas Terminal;
3. Menyediakan infrastruktur pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan sesuai dengan kebutuhan;
4. Mewujudkan Tata Guna Lahan daratan dan perairan sesuai Rencana Induk Pelabuhan dan DLKr / DLKp.

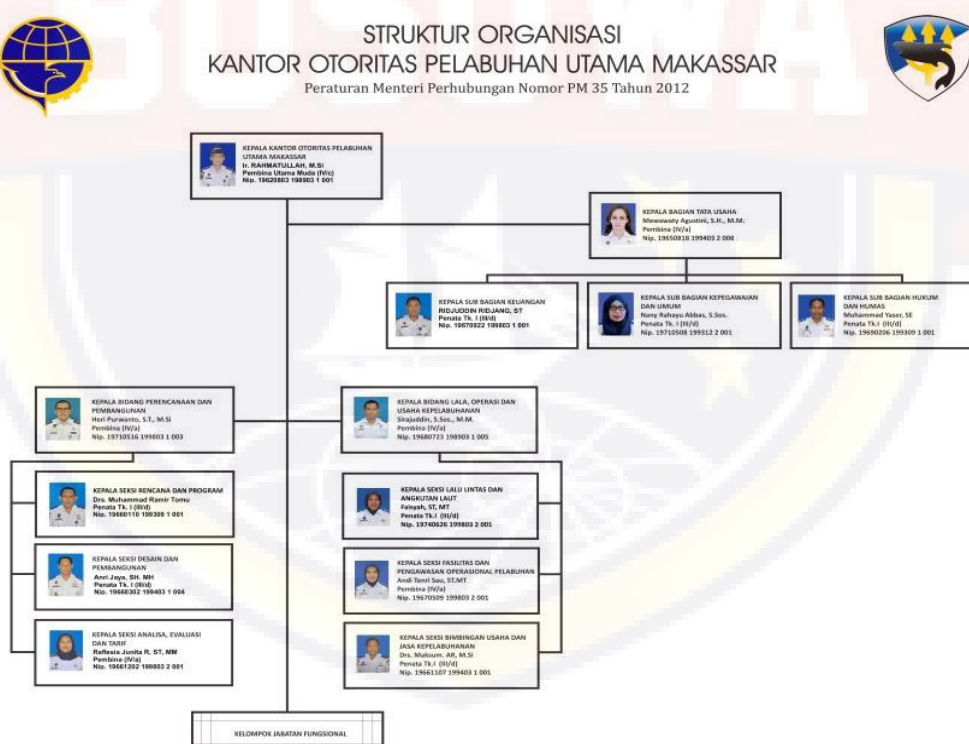
4.1.3 Tugas dan Fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar

Sesuai dengan Peraturan Menteri PM 35/2012, tugas Kantor Otoritas Pelabuhan Utama adalah untuk mengawasi, mengontrol dan mengawasi kegiatan pelabuhan di pelabuhan komersial. Saat melakukan tugas yang diharapkan, otoritas pelabuhan utama melakukan fungsi berikut:

- a. Menyediakan, mengelola dan mengawasi penggunaan lahan dan perairan pelabuhan;
- b. Menyediakan dan memelihara pemecah gelombang, kolam pelabuhan, saluran air dan jaringan jalan raya;
- c. Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan alat bantu navigasi dan navigasi;
- d. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan pelabuhan;
- e. Menerapkan perumusan rencana induk pelabuhan, wilayah lingkungan kerja dan wilayah kepentingan pelabuhan, dan mengawasi penggunaannya;
- f. Rekomendasi tarif menteri eksekutif atas penggunaan air dan / atau darat, fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh pemerintah, dan layanan pelabuhan yang dikelola oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Menerapkan peraturan lalu lintas kapal dan memandu masuk dan keluar pelabuhan melalui kapal;
- h. Menjamin keamanan dan ketertiban, dan membuat arus kargo pelabuhan tidak terhalang;

- i. Menyediakan dan / atau menyediakan layanan pelabuhan yang dibutuhkan oleh pengguna jasa yang tidak disediakan oleh badan usaha pelabuhan
- j. Memberikan perlakuan istimewa kepada entitas operasi pelabuhan atau bentuk lain untuk menjalankan kegiatan komersial di pelabuhan;
- k. Mempersiapkan bahan yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi standar kinerja operasi pelayanan pelabuhan; pengelolaan urusan administrasi, PNS, keuangan, hukum dan kehumasan.

4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (Website Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar).

4.1.5 Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bagian

a. Bagian Tata Usaha

Tugas :

Tanggung jawab: Keuangan, urusan sipil dan resmi, hukum dan hubungan masyarakat, dan pelaporan di kantor otoritas pelabuhan utama di Makassar.

Fungsi:

- 1) Pengelolaan keuangan, sistem akuntansi lembaga pelapor (SAI) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), simpanan dan pembukuan.
- 2) Melaksanakan urusan kepegawaian, membina dan mengembangkan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, kompleksitas dan urusan umum.
- 3) Melaksanakan urusan bantuan hukum dan menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum dan kehumasan.

b. Bidang perencanaan dan pembangunan

Tugas:

Melaksanakan rencana kerja, perencanaan dan persiapan desain, menganalisis dan mengevaluasi penyediaan lahan dan perairan pelabuhan, menyediakan dan memelihara pemecah gelombang, kolam keruk dan saluran air, reklamasi, jaringan jalan, alat bantu navigasi, sarana dan prasarana pelayanan pelabuhan serta perencanaan pelabuhan kepemilikan, wilayah lingkungan kerja (DLK_r) dan wilayah pelabuhan penting (DLK_p), penyusunan dan pengusulan kepada menteri

terkait penggunaan air dan / atau tanah, layanan pelabuhan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- 1) Menyiapkan bahan untuk mempersiapkan rencana kerja penyediaan pelabuhan darat dan laut, menyediakan dan memelihara pemecah gelombang, kolam keruk dan saluran air, reklamasi, jaringan jalan dan alat bantu navigasi;
- 2) Menyiapkan bahan persiapan masterplan pelabuhan, serta wilayah kerja pelabuhan (DLKr) dan wilayah kepentingan pelabuhan (DLKp);
- 3) Menyiapkan bahan untuk menentukan standar kinerja operasi jasa pelabuhan;
- 4) Menyiapkan bahan untuk pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pelabuhan yang tidak disediakan oleh badan usaha pelabuhan dan dibutuhkan oleh pengguna jasa;
- 5) Menyiapkan bahan untuk mempersiapkan rencana penyediaan dan pemeliharaan pemecah gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan saluran air, reklamasi, jaringan jalan, dan fasilitas pendukung navigasi;
- 6) Persiapan bahan perancangan untuk rencana desain konstruksi fasilitas pelabuhan utama dan fasilitas pendukung pelabuhan;
- 7) Menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pelabuhan yang

dibutuhkan oleh pengguna jasa yang tidak disediakan oleh badan jasa kepelabuhanan;

8) Menyiapkan bahan untuk menganalisis dan mengevaluasi struktur pemecah gelombang, kolam pengerukan dan saluran air, reklamasi, jaringan jalan, alat bantu navigasi, fasilitas pelayanan pelabuhan dan fasilitas pelayanan pelabuhan, dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh pengguna jasa yang tidak disediakan oleh pengguna pelabuhan. Entitas Material; dan

9) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyiapkan bahan yang disusun oleh menteri untuk menyusun dan mengusulkan tarif penggunaan tanah dan / atau air, fasilitas pelabuhan dan jasa pelabuhan yang disediakan oleh Otoritas Pelabuhan.

c. Bidang lalu lintas dan angkutan laut, operasi, dan usaha kepelabuhanan

Tugas:

Pelaksanaan regulasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan transportasi laut, penggunaan lahan darat dan air, fasilitas pelabuhan dan wilayah operasi dan lingkungan kerja (DLKp) dan kawasan kepentingan pelabuhan (DLKp), keamanan dan ketertiban pelabuhan, penjaminan dan pengawasan regulasi dan pengawasan pemeliharaan. Ketahanan lingkungan, pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan, pembinaan usaha, dan penyediaan dan latau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan kapal asing serta pemberian dispensasi syarat bendera;
- 2) Penyiapan bahan penjaminan kelancaran arus barang serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- 3) Penyiapan bahan pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal;
- 4) Penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
- 5) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan standar peralatan bongkar muat;
- 6) Mempersiapkan untuk menerapkan bahan perlindungan lingkungan di pelabuhan;
- 7) Mempersiapkan bahan untuk menyetujui rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, melaksanakan pengelolaan terminal untuk kepentingan pribadi, meningkatkan kapasitas terminal dan operasi pelabuhan 24 jam (24 jam)

- 8) Menyiapkan bahan pemberian konsesi atau bentuk lain kepada badan usaha pelabuhan dan penyediaan dan / atau jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh badan usaha pelabuhan (BUP);
- 9) Mempersiapkan bahan untuk mempersiapkan sistem dan prosedur pelayanan pelabuhan, dan menyediakan dan mengelola sistem informasi transportasi air dan sistem informasi pelabuhan; dan
- 10) Menyiapkan bahan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi standar kinerja operasional pelayanan pelabuhan.

4.2 Deskripsi Data

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar untuk periode tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2017-2020, untuk kemudian dianalisis guna mengetahui tingkat efektif dan efisien dalam pengelolaan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun data keuangan yang diperoleh yaitu Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekapitulasi Piutang dan Penyetoran PNBP. Berikut data yang diperoleh :

TABEL 4.1
REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BULAN DESEMBER 2018
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	BULAN	PENERIMAAN						PENYETORAN						SALDO						KETERA NGAN
		RAMBU 425514	PUP 425515	PJUK 425513	JTL 425519	KONSESI 425518	JUMLAH	RAMBU 425514	PUP 425515	PJUK 425513	JTL 425519	KONSESI 425518	JUMLAH	RAMBU	PUP	PJUK	JTL	KONSESI	JUMLAH	
	SALDO AWAL			174.650	1.458.046		1.632.696									174.650	1.458.046		1.632.696	
1	JANUARI			1.501.173.798	24.160.218	3.292.062.568	4.817.396.584			1.501.334.248	25.618.264	3.292.062.568	4.819.015.080			14.200			14.200	
2	FEBRUARI			1.625.247.494	26.324.379		1.651.571.873			1.625.257.244	26.324.379		1.651.581.623			4.450			4.450	
3	MARET			1.401.924.724	43.011.681		1.444.936.405			1.401.915.424	41.779.407		1.443.694.831			13.750	1.232.274		1.246.024	
4	APRIL			1.392.842.247	45.564.633	3.208.946.980	4.647.353.860			1.392.831.997	45.814.331	3.208.946.980	4.647.593.308			24.000	962.576		1.006.576	
5	MEI			1.324.425.818	52.880.447		1.377.306.265			1.324.449.818	53.863.023		1.378.312.841						-	
6	JUNI			1.102.898.948	26.442.886		1.129.341.834			1.102.279.338	26.442.886		1.128.722.224			619.510			619.510	
7	JULI			1.246.210.273	40.900.841	3.359.266.496	4.646.377.610			1.246.825.633	40.900.841	3.359.266.496	4.646.992.970			4.250			4.250	
8	AGUSTUS			1.014.041.647	39.045.099		1.053.086.746			1.013.985.397	38.764.363		1.052.749.760			60.500	280.736		341.236	
9	SEPTEMBER			1.076.938.504	26.508.463		1.103.446.967			1.076.979.504	25.937.475		1.102.916.979			19.500	851.724		871.224	
10	OKTOBER			1.080.438.100	33.238.712	3.513.749.762	4.627.426.574			1.080.342.600	34.090.436	3.513.749.762	4.628.182.798			115.000			115.000	
11	NOVEMBER			1.257.475.491	17.517.718		1.274.993.209			1.257.564.341	17.517.718		1.275.082.059			26.150			26.150	
12	DESEMBER			1.146.345.222	50.360.942	2.366.166.852	3.562.873.016			1.146.365.122	50.360.942	2.366.166.852	3.562.892.916			6.250			6.250	
	JUMLAH			15.170.136.916	427.414.065	15.740.192.658	31.337.743.639			15.170.130.666	427.414.065	15.740.192.658	31.337.737.389			6.250			6.250	

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, 2021

TABEL 4.2
REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BULAN DESEMBER 2019
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	BULAN	PENERIMAAN						PENYETORAN						SALDO						KETERANGAN
		RAMBU 425514	PUP 425515	PJUK 425513	JTL 425519	KONSESI 425518	JUMLAH	RAMBU 425514	PUP 425515	PJUK 425513	JTL 425519	KONSESI 425518	JUMLAH	RAMBU	PUP	PJUK	JTL	KONSESI	JUMLAH	
	SALDO AWAL			6.250			6.250									6.250			6.250	
1	JANUARI			1.088.343.120	7.858.361	1.056.193.808	2.152.395.289			1.088.349.370	7.858.361	1.056.193.808	2.152.401.539						-	
2	FEBRUARI			1.230.563.203	30.605.384		1.261.168.587			1.230.551.903	30.605.384		1.261.157.287			11.300			11.300	
3	MARET			1.046.633.292	35.458.631		1.082.091.923			1.046.512.582	35.458.631		1.081.971.213			132.010			132.010	
4	APRIL			1.168.342.577	16.188.593	3.649.106.226	4.833.637.396			1.168.302.077	16.188.593	3.649.106.226	4.833.596.896			172.510			172.510	
5	MEI			1.058.331.733	31.694.841		1.090.026.574			1.058.493.043	31.694.841		1.090.187.884			11.200			11.200	
6	JUNI			735.822.189	13.007.811		748.830.000			735.761.139	9.918.654		745.679.793			72.250	3.089.157		3.161.407	
7	JULI			1.059.652.008	48.628.433	3.114.490.727	4.222.771.168			1.059.717.308	51.717.590	3.114.490.727	4.225.925.625			6.950			6.950	
8	AGUSTUS			1.176.078.027	12.649.208		1.188.727.235			1.176.037.877	12.069.052		1.188.106.929			47.100	580.156		627.256	
9	SEPTEMBER			1.329.681.093	16.306.945		1.345.988.038			1.329.728.193	12.316.601		1.342.044.794				4.570.500		4.570.500	
10	OKTOBER			1.221.890.362	56.876.164	3.852.640.635	5.131.407.161			1.221.854.112	61.446.664	3.852.640.635	5.135.941.411			36.250			36.250	
11	NOVEMBER			997.466.274	19.578.810		1.017.045.084			997.399.824	19.578.810		1.016.978.634			102.700			102.700	
12	DESEMBER			1.306.413.321	17.135.906	1.978.082.353	3.301.631.580			1.306.516.021	17.135.906	1.978.082.353	3.301.734.280							
	JUMLAH			13.419.223.449	305.989.087	13.650.513.749	27.375.726.285			13.419.223.449	305.989.087	13.650.513.749	27.375.726.285							

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, 2021

TABEL 4.3
REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BULAN DESEMBER 2020
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	BULAN	PENERIMAAN						PENYETORAN						SALDO						KETERA NGAN
		RAMBU 425514	PUP 425515	PJUK 425513	JTL 425519	KONSESI 425518	JUMLAH	RAMBU 425514	PUP 425515	PJUK 425513	JTL 425519	KONSESI 425518	JUMLAH	RAMBU	PUP	PJUK	JTL	KONSESI	JUMLAH	
	SALDO AWAL			174.650	1.458.046		1.632.696									174.650	1.458.046		1.632.696	
1	JANUARI			1.501.173.798	24.160.218	3.292.062.568	4.817.396.584			1.501.334.248	25.618.264	3.292.062.568	4.819.015.080			14.200			14.200	
2	FEBRUARI			1.625.247.494	26.324.379		1.651.571.873			1.625.257.244	26.324.379		1.651.581.623			4.450			4.450	
3	MARET			1.401.924.724	43.011.681		1.444.936.405			1.401.915.424	41.779.407		1.443.694.831			13.750	1.232.274		1.246.024	
4	APRIL			1.392.842.247	45.564.633	3.208.946.980	4.647.353.860			1.392.831.997	45.814.331	3.208.946.980	4.647.593.308			24.000	962.576		1.006.576	
5	MEI			1.324.425.818	52.880.447		1.377.306.265			1.324.449.818	53.863.023		1.378.312.841						-	
6	JUNI			1.102.898.948	26.442.886		1.129.341.834			1.102.279.338	26.442.886		1.128.722.224			619.510			619.510	
7	JULI			1.246.210.273	40.900.841	3.359.266.496	4.646.377.610			1.246.825.633	40.900.841	3.359.266.496	4.646.992.970			4.250			4.250	
8	AGUSTUS			1.014.041.647	39.045.099		1.053.086.746			1.013.985.397	38.764.363		1.052.749.760			60.500	280.736		341.236	
9	SEPTEMBER			1.076.938.504	26.508.463		1.103.446.967			1.076.979.504	25.937.475		1.102.916.979			19.500	851.724		871.224	
10	OKTOBER			1.080.438.100	33.238.712	3.513.749.762	4.627.426.574			1.080.342.600	34.090.436	3.513.749.762	4.628.182.798			115.000			115.000	
11	NOVEMBER			1.257.475.491	17.517.718		1.274.993.209			1.257.564.341	17.517.718		1.275.082.059			26.150			26.150	
12	DESEMBER			1.146.345.222	50.360.942	2.366.166.852	3.562.873.016			1.146.365.122	50.360.942	2.366.166.852	3.562.892.916			6.250			6.250	
	JUMLAH			15.170.136.916	427.414.065	15.740.192.658	31.337.743.639			15.170.130.666	427.414.065	15.740.192.658	31.337.737.389			6.250			6.250	

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, 2021

TABEL 4.4
REKAPITULASI PIUTANG DAN PENYETORAN PNBP
BULAN DESEMBER 2018
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	BULAN	PIUTANG PNBP PER BULAN						PENYETORAN PIUTANG PNBP													
		RAMBU	PUP	PJUK	JTL	KONSES	JUMLAH	RAMBU			PJUK			JTL			PUP			JUMLAH	NAMA DEBITUR
								NTPN	TGL	JUMLAH	NTPN	TGL	JUMLAH	NTPN	TGL	JUMLAH	NTPN	TGL	JUMLAH		
0	SALDO AWAL			565.788.636			565.788.636	A1DC310F6Q9BDU60	09/01/2019	565.788.636										565.788.636	PT. PELINDO IV
1	JANUARI			584.567.348			584.567.348	2085C5TMGFDM8008	08/02/2019	584.567.348										584.567.348	PT. PELINDO IV
2	FEBRUARI			497.139.087			497.139.087	CA60955MU0DN4418	08/03/2019	497.139.087										497.139.087	PT. PELINDO IV
3	MARET			483.520.156			483.520.156	2D0C26TE1Q6TS0L8	02/04/2019	483.520.156										483.520.156	PT. PELINDO IV
4	APRIL			380.880.112			380.880.112	A14C06OUF6AAFKEO	09/05/2019	380.880.112										380.880.112	PT. PELINDO IV
5	MEI			454.657.310			454.657.310	F1F9B417Q3CLJGP8	09/06/2019	454.657.310										454.657.310	PT. PELINDO IV
6	JUNI			365.317.965			365.317.965	F1F9B417Q3CLJGP8	09/06/2019	365.317.965										365.317.965	PT. PELINDO IV
7	JULI			253.485.797			253.485.797	119CE1JNEGPA2H7K	09/08/2019	253.485.797										253.485.797	PT. PELINDO IV
8	AGUSTUS			345.140.868			345.140.868	D9ADD55DDR5LDN7BN	01/10/2019	345.140.868										345.140.868	PT. PELINDO IV
9	SEPTEMBER			210.848.240			210.848.240	2F0466U8DGDK5PTE	10/10/2019	210.848.240										210.848.240	PT. PELINDO IV
10	OKTOBER			486.340.073			486.340.073	511BA0N9UMFQLB2J	11/10/2019	486.340.073										486.340.073	PT. PELINDO IV
11	NOVEMBER			281.581.841			281.581.841	FC2A48N3D5OADRDD	09/12/2019	281.581.841										281.581.841	PT. PELINDO IV
12	DESEMBER			378.964.928			378.964.928														PT. PELINDO IV

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, 2021

TABEL 4.5
REKAPITULASI PIUTANG DAN PENYETORAN PNBP
BULAN DESEMBER 2019
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	BULAN	PIUTANG PNBP PER BULAN						PENYETORAN PIUTANG PNBP														
		RAMBU	PUP	PJUK	JTL	KONSESI	JUMLAH	RAMBU			PJUK			JTL			PUP			JUMLAH	NAMA DEBITUR	
								NTPN	TGL	JUMLAH	NTPN	TGL	JUMLAH	NTPN	TGL	JUMLAH	NTPN	TGL	JUMLAH			
0	SALDO AWAL			378.964.928			378.964.928	A1DC310F6Q9BDU60	09/01/2019	378.964.928											378.964.928	PT. PELINDO IV
1	JANUARI			286.081.783			286.081.783	2085C5TMGFDM8008	08/02/2019	286.081.783											286.081.783	PT. PELINDO IV
2	FEBRUARI			244.576.614			244.576.614	CA60955MU0DN4418	08/03/2019	244.576.614											244.576.614	PT. PELINDO IV
3	MARET			352.406.505			352.406.505	2D0C26TE1Q6TS0L8	02/04/2019	352.406.505											352.406.505	PT. PELINDO IV
4	APRIL			263.028.659			263.028.659	A14C06OUF6AAFKEO	09/05/2019	263.028.659											263.028.659	PT. PELINDO IV
5	MEI			279.989.461			279.989.461	F1F9B417Q3CLJGP8	09/06/2019	279.989.461											279.989.461	PT. PELINDO IV
6	JUNI			192.485.689			192.485.689	F1F9B417Q3CLJGP8	09/06/2019	192.485.689											192.485.689	PT. PELINDO IV
7	JULI			290.029.111			290.029.111	119CE1JNEGPA2H7K	09/08/2019	290.029.111											290.029.111	PT. PELINDO IV
8	AGUSTUS			283.516.337			283.516.337	D9ADD55DDR5LDN7BN	01/10/2019	283.516.337											283.516.337	PT. PELINDO IV
9	SEPTEMBER			355.193.807			355.193.807	2F0466U8DGDK5PTE	10/10/2019	355.193.807											355.193.807	PT. PELINDO IV
10	OKTOBER			291.040.394			291.040.394	511BA0N9UMFQLB2J	11/10/2019	291.040.394											291.040.394	PT. PELINDO IV
11	NOVEMBER			249.340.584			249.340.584	FC2A48N3D5OADRDD	09/12/2019	249.340.584											249.340.584	PT. PELINDO IV
12	DESEMBER			368.585.743			368.585.743															PT. PELINDO IV

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, 2021

TABEL 4.6
REKAPITULASI PIUTANG DAN PENYETORAN PNB
BULAN DESEMBER 2020
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	BULAN	PIUTANG PNB PER BULAN						PENYETORAN PIUTANG PNB													
		RAMBU	PUP	PJUK	JTL	KONSESI	JUMLAH	RAMBU			PJUK			JTL			PUP			JUMLAH	NAMA DEBITUR
								NTPN	TGL	JUMLAH	NTPN	TGL	JUMLAH	NTPN	TGL	JUMLAH	NTPN	TGL	JUMLAH		
0	SALDO AWAL			368.585.743			378.964.928	CDD900N9UUS10MF8	13/01/2020	368.585.743										368.585.743	PT. PELINDO IV
1	JANUARI			274.808.314			274.808.314	7EE0B6U8DOVMTNIB	11/02/2020	274.808.314										274.808.314	PT. PELINDO IV
2	FEBRUARI			374.146.215			374.146.215	96A800N9UV221NTM	10/03/2020	374.146.215										374.146.215	PT. PELINDO IV
3	MARET			694.437.651			694.437.651	DEB401JNEPNBUF3B	09/04/2020	694.437.651										694.437.651	PT. PELINDO IV
4	APRIL			645.183.175			645.183.175	CC4AC51QTUMAIG9S	11/05/2020	645.183.175										645.183.175	PT. PELINDO IV
5	MEI			621.949.980			621.949.980	07D258N3DEGFID01	09/06/2020	621.949.980										621.949.980	PT. PELINDO IV
6	JUNI			558.407.364			558.407.364	E0A302G4UKINKCSU	15/07/2020	558.407.364										558.407.364	PT. PELINDO IV
7	JULI			374.587.729			374.587.729	7CDA76U8DPHHTMAF	10/08/2020	374.587.729										374.587.729	PT. PELINDO IV
8	AGUSTUS			421.992.138			421.992.138	D484F1JNEQ642VRP	08/09/2020	421.992.138										421.992.138	PT. PELINDO IV
9	SEPTEMBER			532.645.311			532.645.311	2CE3346VUADAMQF6	06/10/2020	532.645.311										532.645.311	PT. PELINDO IV
10	OKTOBER			619.283.140			619.283.140	4657CBUBDPQDCA4H	05/11/2020	619.283.140										619.283.140	PT. PELINDO IV
11	NOVEMBER			221.327.239			221.327.239	55EA77QLTKFT7PFO	10/12/2020	221.327.239										221.327.239	PT. PELINDO IV
12	DESEMBER			271.207.662			271.207.662														PT. PELINDO IV

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, 2021

4.3 Analisis Data

4.3.1 Pengelolaan Piutang PNB

Didalam pelaksanaan pengelollan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, digunakan empat ketentuan meliputi :

1. Standar Kredit

Didalam memberikan kredit atas piutang PNB

Kepada pihak debitur, tentu Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar menetapkan standar kreditnya. Adapun standar kredit yang ditetapkan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar berdasarkan ketetapan didalam UU PNB

bahwa dalam pelaksanaan pelunasan piutang PNB

dilakukan dengan pelunasan dalam tempo 30 hari dan pemberian sanksi administrasi sebesar 2% jika pembayaran lewat dari tempo yang telah ditetapkan.

2. Syarat Kredit

Sejak diterapkannya pengelolaan keuangan berbasis akrual semua yang terkait penerimaan dan pembayaran piutang dilakukan secara online, oleh karena itu tidak ada persyaratan kredit secara spesifik terkait piutang PNB

pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Setiap pihak debitur yang ingin membayar piutang PNB

harus membayar sesuai kode e-billing yang diterima (Lampiran 1).

Dengan system pembayaran online ini maka Kantor Otoritas Pelauhan Utama Makassar dapat memberikan kredit kepada pihak debitur dengan aman.

3. Kebijakan Pengumpulan Piutang

Kebijakan pengumpulan piutang yang dilakukan kantor otoritas pelabuhan utama Makassar atas penjualan kredit yang telah diberikan dalam waktu yang telah jatuh tempo yaitu 30 hari dengan penerbitan surat penagihan atau SPn pertama. Apabila terdapat pihak wajib bayar atau debitur yang tidak dapat membayar maka kantor otoritas pelabuhan utama Makassar akan mengeluarkan SPn kedua dan ketiga di mana masing-masing berjangka 30 hari. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan kantor otoritas pelabuhan utama Makassar dalam melakukan penagihan piutang PNBPN yang telah jatuh tempo seperti :

- a. Menerbitkan Surat Penagihan (SPn)
 - b. Menghubungi secara langsung
 - c. Melakukan Kunjungan Personal
 - d. Melimpahkan penyerahan tagihan ke Direktorat Jenderal Kekayaan.
4. Pengukuran efektivitas pengelolaan piutang PNBPN

Penjualan secara kredit tentu akan mengakibatkan dan mempengaruhi efektivitas pengelolaan piutang PNBPN. Oleh karena itu Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar perlu menganalisis pengelolaan piutang dengan menggunakan rasio-rasio yang berkaitan dengan piutang. Selain itu, dengan menggunakan alat ukur berupa rasio-rasio ini dapat menunjukkan seberapa efektif dan efisien pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

Berdasarkan data rekapitulasi penerimaan dan penyetoran PNBPN tahun 2018-2020 serta rekapitulasi piutang dan penyetoran PNBPN tahun 2018-2020

dapat di sajikan dalam tabel 4.7 sebagai berikut :

**TABEL 4.7 PENERIMAAN DAN PIUTANG PNBPN
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
TAHUN 2018-2020**

Tahun	Penerimaan	Total Piutang	Piutang Tertagih	Piutang Tak tertagih	Piutang awal	Piutang akhir
2018	Rp 31.337.743.639	Rp 5.288.232.361	Rp 4.909.267.433	Rp 378.964.928	Rp 565.788.636	Rp 378.964.928
2019	Rp 27.375.726.285	Rp 3.835.239.615	Rp 3.466.653.872	Rp 368.585.743	Rp 378.964.928	Rp 368.585.743
2020	Rp 28.082.880.494	Rp 5.978.571.681	Rp 5.707.364.019	Rp 271.207.662	Rp 368.585.743	Rp 271.207.662

Sumber : Data Diolah, 2021

Analisis Pengelolaan Piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dalam penelitian ini adalah suatu proses penelitian untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dalam periode 2017-2020. Adapun rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio aktivitas yang meliputi rasio perputaran piutang (*receivable turn over*), rasio rata-rata waktu penagihan piutang (*average collection period*), rasio tunggakan dan rasio penagihan. Hasil dari perhitungan rasio ini akan disimpulkan apakah pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah efektif dan efisien atau belum.

1. Rasio Perputaran Piutang (*Receivable Turn Over*)

Untuk melihat seberapa efektif dan efisien pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dapat diketahui dari seberapa kali penagihan piutang dilakukan maka dengan menggunakan rasio perputaran piutang. Semakin cepat perputaran

piutangnya, maka akan semakin efektif pula Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dalam mengelolah piutangnya.

1) Tahun 2018

$$\text{Rata - rata piutang} = \frac{\text{Rp } 565.788.636 + \text{Rp } 378.964.929}{2} = 472.376.782$$

$$\text{RTO} = \frac{\text{Rp } 31.337.743.639}{\text{Rp } 472.376.782} \times 1\text{Kali} = 66,3 \text{ Kali}$$

2) Tahun 2019

$$\text{Rata - rata piutang} = \frac{\text{Rp } 378.964.928 + \text{Rp } 368.585.743}{2} = 373.755.335,5$$

$$\text{RTO} = \frac{\text{Rp } 27.375.726.285}{\text{Rp } 373.755.335,5} \times 1\text{Kali} = 73,2 \text{ Kali}$$

3) Tahun 2020

$$\text{Rata - rata piutang} = \frac{\text{Rp } 368.585.743 + \text{Rp } 271.207.662}{2} = 319.896.702,5$$

$$\text{RTO} = \frac{\text{Rp } 28.082.880.494}{\text{Rp } 319.896.702,5} \times 1\text{Kali} = 87,8 \text{ Kali}$$

Dari hasil perhitungan Rasio Perputaran piutang penerimaan negara bukan pajak pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar maka dapat disajikan dalam tabel 4.8 sebagai berikut :

**TABEL 4.8 HASIL ANALISIS RASIO PERPUTARAN PIUTANG PNBP
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR**

Tahun	Penjualan Kredit (RP)	Rata-rata piutang (RP)	RTO (kali)
2018	31.337.743.639	378.964.928	66,3
2019	27.375.726.285	373.755.335,5	73,2
2020	28.082.880.494	319.896.702,5	87,8

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis rasio perputaran piutang (*receivable turn over*) diketahui bahwa efektivitas Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dalam pengelolaan Piutang dari hasil analisis rasio perputaran piutang menunjukkan tingkat perputaran piutang sangat efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan perubahan rasio perputaran piutang yang meningkat setiap tahunnya dari tahun 2018-2020 sehingga mengakibatkan tingkat RTO Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sangat tinggi.

2. Rasio Rata-Rata Waktu Penagihan Piutang (*Average Collection Period*)

Selain rasio penagihan piutang, untuk mengukur efektif dan efisiennya pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar juga dapat di ukur dari rata-rata waktu penagihan piutang yang akan menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan kantor otoritas pelabuhan utama Makassar membuat piutang PNBPnya tertagih.

1) Tahun 2018

$$ACP = \frac{365}{66,3} = 6 \text{ Hari}$$

2) Tahun 2019

$$ACP = \frac{365}{73,2} = 5 \text{ Hari}$$

3) Tahun 2020

$$ACP = \frac{365}{87,8} = 4 \text{ Hari}$$

Hasil perhitungan rasio rata-rata waktu penagihan piutang penerimaan negara bukan pajak pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar disajikan dalam tabel 4.9 berikut:

TABEL 4.9 HASIL ANALISIS RASIO RATA-RATA WAKTU PENAGIHAN PIUTANG PNBP KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

Tahun	RTO (kali)	ACP (Hari)
2018	66,3	6
2019	73,2	5
2020	87,8	4

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan rata-rata waktu penagihan piutang (ACP) penerimaan negara bukan pajak pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar pada tahun 2018 sebesar 6 hari yang berarti rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melunasi piutang PNBP yaitu 6 hari. kemudian pada tahun 2019 waktu yang dibutuhkan hanya 5 hari, dan pada tahun 2020 waktu yang dibutuhkan untuk mengubah piutang menjadi kas yaitu 4 hari. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah efisien dan efektif dalam mengelolah piutang PNBPnya, hal ini dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan relatif cepat setiap tahunnya dari yang diharapkan, sehingga Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dapat lebih efektif dan efisien dalam upaya untuk mengubah piutang menjadi kas dengan waktu yang singkat.

3. Rasio Tunggakan

Rasio berikutnya yang dapat menunjukkan efektivitas pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah rasio tunggakan dari rasio ini dapat memperlihatkan berapa persen jumlah piutang PNBP yang belum tertagih atau telah jatuh tempo dari total penerimaan piutang.

1) Tahun 2018

$$RT = \frac{\text{Rp } 387.964.928}{\text{Rp } 5.288.232.361} \times 100\% = 7,17\%$$

2) Tahun 2019

$$RT = \frac{\text{Rp } 368.585.743}{\text{Rp } 3.835.239.615} \times 100\% = 9,61\%$$

3) Tahun 2020

$$RT = \frac{\text{Rp } 271.207.662}{\text{Rp } 5.978.571.681} \times 100\% = 4,54\%$$

Dari hasil perhitungan rasio tunggakan piutang penerimaan negara bukan pajak pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar diatas disajikan dalam tabel 4.10 berikut ini :

TABEL 4.10 HASIL ANALISIS RASIO TUNGGAKAN PIUTANG PNBP KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

Tahun	Total Piutang	Piutang Tak Tertagih	Rasio Tunggakan
2018	Rp 5.288.232.361	Rp 378.964.928	7,17%
2019	Rp 3.835.239.615	Rp 368.585.743	9,61%
2020	Rp 5.978.571.681	Rp 271.207.662	4,54%

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis rasio tunggakan diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar mengalami fluktuasi hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 sebesar 7.17%, kemudian pada tahun 2019 rasio tunggakan naik menjadi 9.61% dan pada tahun 2020 yang kemudian turun menjadi 4,54%. Tunggakan tertinggi terjadi pada tahun 2019 hal ini disebabkan karena total piutang yang juga menurun. Pada tahun 2020 jumlah piutang yang tak tertagih mengalami penurunan hal ini disebabkan banyak pihak debitur yang membayar tepat waktu bahkan lebih awal sebelum batas jatuh tempo. Semakin kecil rasio tunggakan maka akan semakin baik bagi kantor otoritas pelabuhan utama Makassar didalam mengelolah piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

4. Rasio Penagihan

Rasio terakhir yang dapat digunakan dalam mengukur efektivitas Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dalam pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dikelolaknya yaitu rasio penagihan. Dari rasio ini dapat diketahui sejauhmana pihak pengelolah PNBP melakukan penagihan terhadap piutangnya.

1) Tahun 2018

$$RP = \frac{\text{Rp } 4.909.267.433}{\text{Rp } 5.288.232.361} \times 100\% = 92,83\%$$

2) Tahun 2019

$$RP = \frac{\text{Rp } 3.466.653.872}{\text{Rp } 3.835.239.615} \times 100\% = 90,38\%$$

3) Tahun 2020

$$RP = \frac{\text{Rp } 5.707.364.019}{\text{Rp } 5.978.571.681} \times 100\% = 95,46\%$$

Hasil perhitungan rasio penagihan piutang penerimaan negara bukan pajak pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar disajikan dalam tabel 4.5 berikut:

TABEL 4.11 HASIL ANALISIS RASIO PENAGIHAN PIUTANG PNBPKANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

Tahun	Total Piutang	Piutang Tertagih	Rasio Penagihan (%)
2018	Rp 5.288.232.361	Rp 4.909.267.433	92,83%
2019	Rp 3.835.239.615	Rp 3.466.653.872	90,38%
2020	Rp 5.978.571.681	Rp 5.707.364.019	95,46%

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio penagihan piutang diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 rasio penagihan sebesar 92,83%, tahun 2019 sebesar 90,38% dan tahun 2020 sebesar 95,46%. Pada tahun 2019 rasio penagihan mencapai titik terendah dari tahun sebelumnya, hal ini juga disebabkan karena jumlah total piutang yang rendah pada tahun tersebut. Kemudian ditahun berikutnya yaitu tahun 2020 rasio penagihan kembali meningkat dari total piutang yang juga meningkat. Dari analisis rasio ini dapat dikatakan bahwa pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah efektif dan efisien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar tahun 2018-2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis rasio perputaran piutang (*receivable turn over*) dan rasio rata-rata waktu penagihan piutang (*average collection period*) menunjukkan bahwa pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar tahun 2018-2020 yang dicapai telah efisien dan efektif.
2. Berdasarkan hasil analisis rasio tunggakan piutang dan rasio penagihan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar tahun 2018-2020 yang dicapai telah efisien dan efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya didalam pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah optimal, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dapat mempertahankan atau semakin meningkatkan perputaran piutang

dan rata-rata waktu penagihan piutang agar terwujudnya pengelolaan piutang yang semakin efisien dan efektif.

2. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sebaiknya tetap menjaga kestabilan pengelolaan piutang dengan mengurangi piutang tak tertagih dan menjaga percepatan penagihan piutang akan dapat membantu dalam mewujudkan pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti dkk. 2020. *Manajemen Keuangan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Anwar, Mokhammad. 2019. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Darmayasa, Putu. 2017. Analisis Efektivitas Perputaran Piutang Terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Serba Usaha Giriarta Makassar. *Jurnal Riset edisi XVI unibos Makassar mei 2017*. Vol 3, No. 005 (2017). Diambil dari <https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/101> (19 Februari 2021).
- Demak, Yulindasari Kiay dkk. 2018. Analisis Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur piutang pada PT. Air Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 347-355. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/21151/20861> (3 Maret 2021).
- Dewi, Meutia. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT. Smartfren Telecom, Tbk. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi(JENSI)*, Vol. 1, NO. 1, Juni 2017. Diambil dari <https://ejurnalunsam.id/index.php/jensi/article/download/394/287> (3 Maret 2021).
- Elaga, M Panji dkk. 2018. Analisis rasio aktivitas untuk menilai kinerja keuangan pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. *SIJDEB* Vol. 2 (4), 2018, Hal. 1-11. Diambil dari https://repository.unsri.ac.id/24552/1/674_152886_Analisis_Rasio_Aktivitas_Untuk_Menilai_Kinerja_Keuangan_Pada_PT_Hanjaya_Mandala_Sampoerna_Tbk_.pdf (3 Maret 2021).
- Gista, Erlinda dkk. 2017. Analisis piutang dagang pada PT. Cahaya Lestari Teguh Makmur (CLTM). Karya ilmiah mahasiswa akuntansi. Diambil dari <http://eprints.jeb.polinela.ac.id/55/1/JURNAL%20OKE.pdf> (22 april 2021).
- Handini, Sri. 2020. *Buku Ajar: Manajemen Keuangan*. Surabaya: Scopindo.
- Herispon. 2018. *Buku ajar: Manajemen Keuangan (financial management) edisi revisi*. Pekanbaru: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau. Diambil dari https://www.researchgate.net/profile/Herispon-Herispon-2/publication/328825174_BUKU_AJAR_MANAJEMEN_KEUANGAN_FINANCIAL_MANAGEMENT_EDISI_REVISI_SEKOLAH_TINGGI_ILMU_EKONOMI_RIAU_PEKANBARU_2018/links/5be4ed6e45851

50b2ba8fab6/BUKU-AJAR-MANAJEMEN-KEUANGAN-FINANCIAL-MANAGEMENT-EDISI-REVISI-SEKOLAH-TINGGI-ILMU-EKONOMI-RIAU-PEKANBARU-2018.pdf?origin=publication_detail (2 Maret 2021).

Handayani, Lita Marina. 2020. Analisis Pengelolaan Piutang Perusahaan. Artikel Ilmiah. Jakarta: Universitas Mercu Buana. Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/342180017_ARTIKEL_ILMIAH_ANALISIS_PENGELOLAAN_PIUTANG_PERUSAHAAN (3 Maret 2021).

Irfani, Agus S. 2020. *Manajemen Keuangan dan Bisnis: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jatmiko, Dadang Prasetyo. 2017. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.

Kariyoto. 2017. *Analisa Laporan Keuangan*. Malang: UB Press.

_____. 2018. *Manajemen Keuangan: Konsep dan Implementasi*. Malang: UB Press.

Kasmir. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta.

Krisdayanti, Debby. 2015. “Efektivitas Pengelolaan Piutang Untuk Meningkatkan Laba Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Nusantara Surya Sakti Malang)”. Skripsi. Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Diambil dari <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/viewFile/2330/2724> (3 Maret 2021).

Lahengking, Erlita Mentari dkk. 2017. Analisis Piutang Usaha Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Air Madidi Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 357-370. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/17722/17247> (16 Februari 2021).

Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Methasari, Melanny. 2019. *Efektivitas Manajemen Piutang Dalam Upaya Meningkatkan Modal Kerja Pada PT. BRP Aridha Arta Nugraha*. Surabaya: CV. Mitra Sumber Rejeki.

- Mulyaningtyas. 2017. Analisis Efektifitas Pengelolaan Piutang Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia. *Majalah Ekonomi*_ISSN No. 1411-9501_Vol. XXII No. 1_Juli 2017. Diambil dari http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/download/646/pdf/ (2 Februari 2021).
- Mustafa. 2020. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nugraha, Deni Desta dkk. 2020. Pengelolaan Piutang Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Pada PT.Mitra Pinasthika Mustika Tbk. Indonesia. *Businnes UHO: Jurnal Administrasi Bisnis* ISSN 2503-1406 Vol.5 No 1 April 2021. Diambil dari <http://ojs.uho.ac.id/index.php/BUSSINESUHO/article/download/12356/pdf> (2 Februari 2021).
- Nurhayati, Siti. 2017. Peranan Manajemen Keuangan dalam suatu perusahaan. *JBMA-Vol. IV, No. 1, Maret 2017*. Diambil dari <http://jurnal.amaypk.ac.id/index.php/jbma/article/download/56/58/> (2 Maret 2021).
- Nur, Sri Wahyuni. 2020. *akuntansi dasar: teori & teknik penyusunan laporan keuangan*. Makassar: Cendikia Publisher.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Perhubungan*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang *petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada direktorat jenderal perhubungan laut*.
- Pertiwi, Imanda Firmantyas Putri dkk. 2020. *Pengantar Akuntansi Lanjutan*. Depok: Rajawali Pers.
- Pratiwi, Fani. 2019. “Perlakuan Akuntansi Atas Piutang Usaha Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan Pada PT. Telkomedika di Surabaya”. Skripsi. Ekonomi dan Bisnis. Universitas Bhayangkara Surabaya. Diambil dari http://eprints.ubhara.ac.id/585/1/Fani%20Pratiwi%20SKRIPSI%20_FIX_%20.pdf (17 Februari 2021).
- Rudianto. 2018. *Akuntansi Intermediate IFRS*. Jakarta: Erlangga.

Salim dan Haidir. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan Dan Jenis*. Jakarta: Prenada Media.

Septiana, Aldila. 2019. *Analisis Laporan Keuangan: Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan*. Pamekasan: Duta Media Publishing

Sugeng, Bambang. 2017. *Manajemen Keuangan Fundamental*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Sugiarti dkk. 2020. *Desain Penelitian Kualitatif: Sastra*. Malang: UMM Press.

Sumiyati dan Yatimatun Nafi'ah. 2021. *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.

Tulsion, P C dkk. 2020. *Financial Management for CA-Intermediate (Group II)*. India: McGraw Hill Education.

Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 tentang *Penerimaan Negara Bukan Pajak*.

Widayanti, Ike Herina. 2019. "Analisis Pengelolaan Dan Pengendalian Piutang Untuk Meningkatkan Efektivitas Penagihan Piutang Macet Di PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo". Rangkuman Skripsi. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta. Diambil dari <http://repository.stieykpn.ac.id/550/1/RINGKASAN%20SKRIPSI%20Ike%20Herina%20Widayanti%20-%20311729564.pdf> (17 Februari 2021).

Wijaya, David. 2017. *Manajemen Keuangan: Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: PT Grasindo.

LAMPIRAN 1

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPON)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

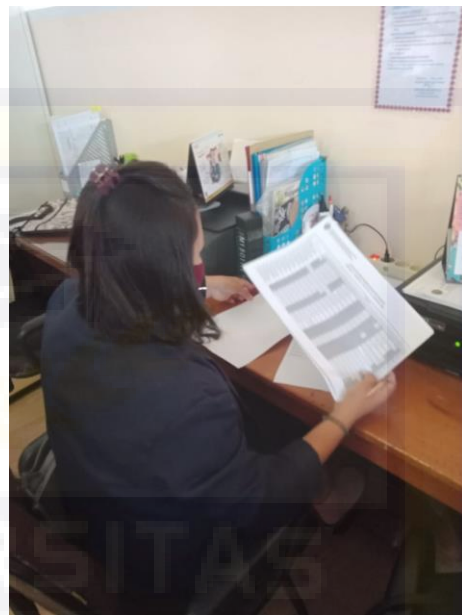
Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820200630665638
Tanggal Billing	: 30-06-2020 15:10:29
Tanggal Kedaluwarsa	: 07-07-2020 15:10:29
Tanggal Bayar	: 30-06-2020 15:13:53
Bank/Pos Bayar	: BANK MANDIRI
Channel Bayar	: ATM
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMA KTR OTORITAS PELAB. UTAMA MKS
Kementerian/Lembaga	: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
Satuan Kerja	: KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASAR
Total Disetor	: 8.650 (IDR)
Terbilang	: <i>Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 00000747664
NTPN	: A4B657QLIJUN0GD6

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: III. JASA TRANSPORTASI LAUT - B. JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL - 1. Jasa Pelayanan Kapal - a. Jasa Labuh - 1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum - a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga - (3) kapal pelayaran rakyat - (a) kelas utama
Kode Akun	: 425513 - Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
Jumlah Setoran	: 8.650 (IDR)
Keterangan	: PT.SRIKANDI TUJU-TUJU/KLM.SURGA BAHARI/NT.0269987/KW.0390870

(Sumber : Dokumentasi, 2021)

LAMPIRAN 2

(Sumber : Dokumentasi, 2021)

LAMPIRAN 3

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASME

NOMOR : A. 538 /FEB/UNIBOS/V/ 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: Incha Apriella
Stambuk	: 4517012077
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi Dan Bisnis / Manajemen

Dinyatakan bebas dari Plagiasme dengan batas maksimal 30 % yang berhubungan skripsi dengan judul: "Analisis Pengelolaan Plutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Makassar, 20 Mei 2021



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si., M.H.
NIDN : 09 07077003

FORMULIR PENGAJUAN PENERBITAN

Nama Lengkap : Incha Apriella
Stambuk : 4517012077
Alamat : Jl. Pampang Raya
Telpon/HP : 085389757494
E-mail : incha.apriella@gmail.com
Judul Skripsi :

"Analisis Pengelolaan Plutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar".

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benar bahwa:

1. Naskah yang diserahkan adalah karya asli dan bebas dari fabrikasi, plagiasi, duplikasi dan Pelanggaran hak cipta data/isi.
2. Naskah belum pernah diterbitkan dan tidak sedang dipertimbangkan oleh penerbit lain
3. Apabila dikemudian hari ada implikasi terhadap hal-hal yang disebutkan di atas, bukan menjadi Tanggung jawab Penerbit dan Dewan Editor.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan jujur dan bertanggung jawab,

Makassar, 20 Mei 2021



INCHA APRIELLA